

PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA, IMPLIKATUR PERCAKAPAN, DAN TEMA DALAM WACANA HUMOR POLITIK

Wahyu, Hermintoyo, Tiani

**SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jln. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang 50275**

ABSTRAK

Humor politik adalah kecenderungan seseorang dalam menciptakan kelucuan dengan mengangkat isu-isu politik sebagai bahan utama dalam humor itu. Humor politik tercipta akibat munculnya rasa ingin tahu masyarakat yang cukup tinggi mengenai permasalahan politik di sebuah negara. Keberadaan humor politik sering digunakan sebagai sarana kritik politik. Kritik itu tidak dituturkan secara langsung, tetapi melalui tuturan-tuturan yang menggelitik dan unik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerja sama dalam wacana humor politik, mendeskripsikan munculnya implikatur percakapan dalam wacana humor politik, dan mendeskripsikan tema yang terdapat dalam wacana humor politik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pustaka dengan teknik simak dilanjutkan dengan teknik catat. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Data dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori pragmatik yang meliputi teori prinsip kerja sama dan implikatur. Penyajian hasil analisis dilakukan dengan menggunakan kata-kata biasa. Penyajian penjelasan tuturan didukung dengan penceritaan kembali isi cerita yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap tuturan humor.

Hasil penelitian yang dicapai adalah pelanggaran prinsip kerja sama terjadi dalam tuturan wacana humor politik, meliputi pelanggaran maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan pelaksanaan. Implikatur yang terdapat dalam wacana humor politik terdiri dari (1) implikatur konvensional dan (2) implikatur nonkonvensional. Tema yang digunakan dalam wacana humor politik berfungsi sebagai bahan terciptanya sebuah kelucuan pada wacana humor tersebut.

Kata kunci : humor politik, pragmatik, prinsip kerja sama, implikatur

PENDAHULUAN

Wacana humor politik merupakan wacana hiburan yang memiliki keterkaitan dengan ilmu pragmatik karena di dalam wacana humor politik terdapat tuturan-tuturan yang mengandung (1) pelanggaran prinsip kerja sama dan (2) implikatur percakapan. Di dalam sebuah tuturan yang efektif peserta tutur dituntut untuk mematuhi prinsip kerja sama, tetapi tuturan yang terdapat dalam wacana humor politik sering melanggar prinsip kerja sama itu. Pelanggaran itu bertujuan untuk menciptakan sebuah kelucuan sehingga, respon tertawa atau tersenyum simpul diperoleh dari penikmat humor. Selain pelanggaran prinsip kerja sama, di dalam wacana humor politik terdapat implikatur percakapan. Munculnya implikatur ini dimanfaatkan oleh pencipta humor untuk menimbulkan efek lucu. Melalui implikatur percakapan, wacana humor politik berhasil membangun sebuah kelucuan yang dapat memberikan respon tertawa atau tersenyum simpul bagi para penikmatnya. Pelanggaran prinsip kerja sama dan implikatur percakapan yang terdapat dalam wacana humor politik itu merupakan objek analisis dalam penelitian ini.

Humor politik merupakan wacana hiburan yang berpotensi memancing respon tersenyum atau tertawa penikmatnya, mengandung pelanggaran prinsip kerja sama dan implikatur percakapan yang berfungsi sebagai pemicu terciptanya sebuah kelucuan. Berikut adalah salah satu contoh wacana humor politik yang mengandung pelanggaran prinsip kerja sama dan implikatur percakapan.

Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945

Dalam sebuah penataran P-4 di sebuah kampus, seorang penceramah bingung melihat para peserta terkantuk-kantuk. Untuk menghangatkan suasana, ia memutuskan mengadakan sesi tanya jawab dengan menunjuk mahasiswa secara acak. Pertanyaan pertamanya, “Bagaimana hubungan Pancasila dengan UUD 45?”

Tak ada yang menjawab. Sang penceramah langsung menunjuk seorang mahasiswa yang duduk di pojok belakang. “Rizal, menurut Anda bagaimana hubungan Pancasila dan UUD 1945?”

Masih rada ngantuk, Rizal langsung menjawab, “Baik-baik aja, Pak!”

(HPI: 11)

Tuturan yang terdapat pada wacana humor politik di atas melanggar prinsip kerja sama dengan subjenis maksim relevansi. Tuturan yang melanggar

maksim relevansi yaitu, “*Baik-baik aja, Pak!*” Jawaban itu tidak relevan dengan tuturan yang membicarakan tentang hubungan Pancasila dan UUD 1945. Selain pelanggaran prinsip kerja sama, tuturan itu juga mengandung implikatur percakapan, yaitu implikatur menyatakan gurauan. Peserta tutur hanya bermaksud untuk bergurau dengan lawan tuturnya. Gurauan yang disampaikan secara tersirat itu menimbulkan efek lucu pada wacana humor politik tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerja sama dalam wacana humor politik.
2. Mendeskripsikan munculnya implikatur percakapan dalam wacana humor politik.
3. Mendeskripsikan tema yang terdapat dalam wacana humor politik.

METODE

Langkah kerja yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian ini berdasarkan pendapat Sudaryanto (1993: 5-7) yang menyatakan bahwa ada tiga tahapan strategis dalam penelitian, yaitu tahap pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis.

Tahapan-tahapan tersebut memiliki metode-metode tersendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Metode-metode ini dijabarkan dalam teknik-teknik. Metode adalah cara yang harus dilaksanakan, sedangkan teknik adalah cara melaksanakan metode (Sudaryanto, 1993: 9).

1. Metode Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pustaka. Metode pustaka adalah metode yang menggunakan sumber-sumber pustaka, berupa buku, artikel atau yang lainnya. Di dalam upaya pengumpulan data, penulis menggunakan metode simak atau penyimakan dan teknik lanjutannya berupa teknik catat. Data-data penelitian ini diambil dari wacana humor politik yang telah dibukukan yang berjudul “Humor Politik Indonesia”

(HPI) karya Felicia N.S. Selain itu data juga diperoleh dari media internet dengan alamat situsnya “ketawa.com” di kolom humor politik.

2. Metode Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan dengan mengumpulkan semua data yang sudah diperoleh, setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, kemudian dianalisis. Tahap analisis data pada penelitian ini menggunakan ancangan pragmatik. Analisis pragmatik ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pelanggaran prinsip kerja sama dan implikatur percakapan yang terdapat pada wacana humor politik.

3. Tahap Penyajian Hasil Analisis Data

Tahap penyajian analisis data bersifat informal yaitu, memuat deskripsi atau penjelasan mengenai hal-hal yang ditemukan selama penelitian. Penjelasan deskriptif ini berdasar data yang telah ditemukan sehingga, hasilnya merupakan gambaran yang sesungguhnya.

LANDASAN TEORI

Pragmatik merupakan studi tentang aktivitas percakapan antara penutur dan mitra tutur. Di dalam aktivitas percakapan itu terdapat makna yang disampaikan penutur di luar tuturan. Oleh karena itu, Yule (terj. Wahyuni, 2006: 3) menjelaskan bahwa studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri.

Adanya ilmu pragmatik mengakibatkan munculnya teori-teori yang dicetuskan oleh ahli-ahli bahasa dari Eropa dan Amerika. Teori tindak tutur diciptakan oleh Austin pada karyanya yang berjudul *How to Do Things with Words* pada tahun 1962 (Rustono, 1998: 11). Karya Austin ini kemudian diteruskan oleh Searle pada tahun 1969. Oleh Searle, teori tindak tutur dapat dikategorikan menjadi lima macam, yaitu representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif (melalui Rustono, 1998: 12).

Grice (melalui Rustono, 1998: 12) mencetuskan tentang teori implikatur percakapan dalam artikelnya yang berjudul “Logic and Conversation” dan dimuat dalam bunga rampai *Syntax and Semantic: Speech Acts* suntingan Cole dan Morgan pada tahun 1975. Gagasan penting lain dalam artikel itu adalah prinsip kerja sama, yaitu beberapa aturan tak-tertulis yang dikehendaki bersama untuk menuntun penutur dan mitra tutur agar dapat melakukan aktivitas percakapan secara efektif dan efisien.

1. Prinsip Kerja Sama

Grice (melalui Wijana, 1996: 46) mengemukakan bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama itu, setiap penutur harus mematuhi empat maksim percakapan (*conversational maxim*), yaitu maksim kuantitas (*maxim of quantity*), maksim kualitas (*maxim of quality*), maksim relevansi (*maxim of relevance*) dan maksim pelaksanaan (*maxim of manner*).

a. Maksim Kuantitas

Maksim ini mengharapkan agar peserta tutur memberikan respons atau jawaban secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan tutur saja. Contohnya ketika seseorang ditanya siapa namanya, maka dia tidak perlu memberikan jawaban selain informasi tentang namanya, seperti alamat, status, dan lain sebagainya.

b. Maksim Kualitas

Maksim percakapan ini mengharuskan setiap partisipan komunikasi mengatakan hal yang sebenarnya. Artinya jawaban atau respons hendaknya didasarkan pada bukti yang memadai. Contohnya ketika seorang murid ditanya gurunya apa ibukota Jepang, maka dia kalau memang tahu harus menjawab Tokyo, karena hal tersebut tidak terbantahkan lagi. Namun, bisa saja terjadi kesengajaan, seorang penutur melanggar maksim kualitas ini. Hal ini tentu mempunyai maksud seperti menimbulkan efek lucu (Wijana, 1996:49).

c. Maksim Relevansi

Maksim relevansi mewajibkan setiap peserta tutur memberikan kontribusi relevan dengan pokok pembicaraan. Maksim relevansi menekankan keterkaitan isi tuturan antar peserta percakapan. Setiap peserta percakapan saling memberikan kontribusi yang relevan dengan topik pembicaraan sehingga tujuan percakapan dapat tercapai secara efektif. Namun, terkadang secara tersurat (eksplisit) respons yang diberikan tidak terlihat relevansinya dengan pokok pembicaraan, karena sudah ada latar belakang pengetahuan (*background knowledge*) yang sama antara penutur dan lawan tutur maka komunikasi masih tetap bisa berjalan. Dengan kata lain, yang tersurat (eksplisit) nampak tidak relevan namun, yang tersirat (implisit) sebenarnya relevan.

d. Maksim Pelaksanaan

Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, secara runtut dan tidak berlebih-lebihan. Bila hal ini dilanggar, biasanya penutur mempunyai tujuan tertentu, misalnya mengelabui, menimbulkan efek lucu, dan tujuan tertentu lainnya.

2. Implikatur

Di dalam membahas implikatur Grice (dalam Rustono, 1998: 81) mengembangkan teori hubungan antara ekspresi, makna, makna penutur, dan implikasi suatu tuturan. Di dalam teorinya itu, ia membedakan tiga jenis implikatur, yaitu implikatur konvensional, implikatur nonkonvensional, dan praanggapan. Selanjutnya implikatur nonkonvensional dikenal dengan nama implikatur percakapan. Selain ketiga macam implikatur itu, Grice (melalui Rustono, 1998: 82) membedakan dua macam implikatur percakapan, yaitu implikatur percakapan khusus dan implikatur percakapan umum.

Implikatur konvensional ialah implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata, dan bukan dari prinsip percakapan (Rustono, 1998: 84). Berikut ini adalah contoh implikatur konvensional.

“Matroji orang Madura sehingga dia pemberani.”

Implikasi tuturan tersebut adalah bahwa keberanian Matroji karena dia orang Madura. Apabila matroji bukan orang Madura, tentu saja tuturan tersebut tidak berimplikasi bahwa keberanian Matroji karena ia orang Madura.

Implikatur nonkonvensional atau implikatur percakapan adalah implikasi pragmatis yang tersirat didalam suatu percakapan (Rustono, 1998: 84). Implikasi pragmatis berbeda dari fungsi pragmatis yang disajikan secara eksplisit oleh tuturan. Di dalam komunikasi, tuturan slalu menyajikan fungsi pragmatis. Dan di dalam tuturan percakapan itulah terimplikasi suatu maksud atau tersirat fungsi pragmatis lain yang dinamakan implikatur percakapan. Contoh tutran yang mengandung implikatur percakapan.

A : “Wah, Pak Adi sekarang sudah menjadi orang.”

B : “Wah, masih seperti dulu.”

Implikatur yang terdapat dalam tuturan di atas adalah bahwa dulu Pak adi belum sukses.

Dua dikotomi lain adalah implikatur percakapan umum dan implikatur percakapan khusus. Implikatur percakapan khusus adalah implikatur yang kemunculannya memerlukan konteks khusus.

Tuturan (1) hanya berimplikasi (2) jika berada di dalam konteks khusus seperti pada percakapan (3) berikut ini.

(1) Kucing itu kelihatan girang.

(2) (Mungkin kucing itu makan bndeng presto.)

(3) A : Di mana bandeng presto itu disimpan?

B : Kucing itu kelihatan girang sekali.

Implikatur percakapan umum adalah implikatur yang kehadirannya di dalam percakapan tidak memerlukan konteks khusus. Implikatur (A) sebagai akibat adanya tuturan (B) merupakan implikatur percakapan umum.

(A) Saya masuk ke sebuah rumah

(B) (Rumah itu bukan milik saya)

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hasil penelitiannya adalah bahwa tuturan-tuturan yang terdapat dalam wacana humor politik mengandung pelanggaran prinsip kerja sama dan implikatur percakapan. Selain itu, di dalam wacana humor politik juga terdapat tema yang berfungsi untuk membangun sebuah kelucuan. Pelanggaran prinsip kerja sama, implikatur percakapan, dan tema yang terdapat pada wacana humor politik berfungsi untuk menunjang terciptanya kelucuan pada wacana humor itu. Berikut adalah analisis data yang mendeskripsikan tentang pelanggaran prinsip kerja sama, implikatur percakapan, dan tema yang digunakan dalam wacana humor politik untuk membangun sebuah kelucuan.

(1) Masalah Gaji Pegawai

Seorang birokrat Indonesia sedang studi banding di Amerika Serikat. Dia bertemu dengan seorang birokrat asal Eropa. Mereka tanya jawab soal penghasilan birokrat di negara masing-masing.

“Berapa gaji Anda?” tanya birokrat Indonesia mengawali pembicaraan.

“Gaji saya 3000 euro. Sepertiganya untuk tempat tinggal, 1000 euro lagi untuk makan, dan 500 euro tabungan dan asuransi.”

“Lalu sisanya yang 500 euro untuk apa?”

Birokrat Eropa itu menjawab ketus, “Oh... itu urusan saya, Anda tidak perlu tahu!”

Birokrat Indonesia manggut-manggut.

Lantas birokrat Eropa itu balik bertanya, “Kalau penghasilan Anda berapa?”

“Gaji saya Rp 3 juta. Saya harus menyisihkan sekitar Rp 2 juta untuk angsuran rumah, Rp 6 juta untuk cicilan mobil, Rp 1,5 juta untuk biaya komunikasi, Rp 5 juta untuk biaya hidup.....”

“Stop! Stop!” birokrat Eropa tadi menyela. “Pengeluaran Anda sudah melebihi gaji Anda. Lalu sisanya dari mana?” tanya birokrat Eropa itu terheran-heran.

Birokrat Indonesia itu menjawab sambil tersenyum, “Itu urusan saya, Mister. Anda tak perlu tahu.”

(HPI: 64-65)

Pada wacana humor politik di atas yang menjadi peserta tutur adalah Birokrat Indonesia dan Birokrat Eropa. Kedua peserta tutur itu memiliki tuturan yang melanggar prinsip kerja sama dengan subjenis maksim kuantitas. Tuturan Birokrat Eropa yang melanggar maksim kuantitas yaitu, “*Gaji saya 3000 euro.*

Sepertiganya untuk tempat tinggal, 1000 euro lagi untuk makan, dan 500 euro tabungan dan asuransi,” sedangkan tuturan Birokrat Indonesia yang melanggar maksim kuantitas yaitu, *“Gaji saya Rp 3 juta. Saya harus menyisihkan sekitar Rp 2 juta untuk angsuran rumah, Rp 6 juta untuk cicilan mobil, Rp 1,5 juta untuk biaya komunikasi, Rp 5 juta untuk biaya hidup.....”* Kedua tuturan ini muncul dari pertanyaan yang sama yaitu, *“Berapa gaji Anda?”* Seandainya Birokrat Eropa hanya menjawab *“Gaji saya 3000 euro”* dan Birokrat Indonesia hanya menjawab *“Gaji saya Rp 3 juta”* tentu tuturan-tuturan itu mematuhi maksim kuantitas. Pelanggaran maksim kuantitas pada wacana humor politik di atas memang disengaja oleh pencipta humor agar dapat membangun sebuah kelucuan.

(2) Mengancam Orang di Bar Karena Kehilangan Jip

Feisal masuk sendirian ke sebuah bar di Jalan Blora, lalu pesan satu gelas bir. Dia minum itu bir pelan-pelan, tapi sebelum habis dia keluar sebentar.

Didapatkannya bahwa jip yang dibawanya tadi tidak ada lagi di tempat parkir. Ia masuk kembali ke bar dan mencabut pistolnya, lalu menembakkannya ke atas sambil berteriak, "SIAPA DI ANTARA BUSYET-BUSYET DI SINI YANG BERANI MENCURI JIP GUA?"

Tidak ada seorang pun dalam bar itu yang berani menjawab. Feisal menaruh pistolnya di meja, lalu teriak lagi, "OKE DEH, GUA PESAN SATU GELAS BIR LAGI, DAN KALAU NANTI GUA HABIS MINUM ITU JIP KAGAK KEMBALI LAGI DI TEMPATNYA, GUA BAKAL LAKUKEN APA YANG GUE PERNAH LAKUKEN DI MANGGA BESAR!"

Ia pesan segelas bir lagi, dia tenggak, lalu dia melangkah ke luar. Eh, itu jip memang betul sudah kembali ke tempatnya. Maka dia pun naik ke mobilnya tapi kemudian teringat bahwa dia belum bayar birnya.

Waktu Feisal mau membayar, si penjaga bar bertanya, "Emangnya apa nyang dulu Ente lakukan di Mangga Besar?"

Feisal: "Maksud lu waktu jip gua nggak kembali?". Si penjaga bar mengangguk.

Feisal: "Ya gua pulang, jalan kaki."

(Ketawa.com:1 Juli 2008)

Tuturan yang mengandung implikatur percakapan terdapat pada tuturan Feisal yaitu, *"OKE DEH, GUA PESAN SATU GELAS BIR LAGI, DAN KALAU NANTI GUA HABIS MINUM ITU JIP KAGAK KEMBALI LAGI DI TEMPATNYA, GUA BAKAL LAKUKEN APA YANG GUE PERNAH LAKUKEN*

DI MANGGA BESAR!" Melalui tuturan itu Feisal hanya bermaksud untuk menakut-nakuti para pengunjung bar agar jip yang di kendainya kembali karena jipnya telah hilang. Tujuan untuk menakut-nakuti itu disampaikan secara tersirat pada tuturan yang melanggar maksim kualitas. Tuturan itu tidak dapat diyakini kebenarannya karena Feisal hanya berbohong tentang apa yang dituturkannya. Ketika penjaga bar bertanya *"Emangnya apa nyang dulu Ente lakuen di Mangga Besar?"* kemudian Feisal menjawab *"Ya gua pulang, jalan kaki."* Sangat jelas bahwa tuturan Feisal hanya bualan. Hal ini yang menjadikan wacana humor politik di atas lucu dan menghibur.

(3) Jam Dinding di Neraka

Setelah kiamat, serombongan mantan penguasa di dunia sedang antre menunggu giliran masuk ke gerbang neraka. Mereka dipanggil masuk satu per satu oleh malaikat yang bertugas di sana. Di dinding belakang tergantung puluhan jam dinding sebagaimana layaknya yang terlihat di bandara udara, untuk menunjukkan posisi waktu yang berbeda-beda di seluruh penjuru dunia. Anehnya, jam-jam dinding yang ada di dekat gerbang neraka berbeda-beda kecepatan berputarnya.

Seorang penguasa dari negeri kecil di Eropa kebingungan. Ia bertanya kepada malaikat. Sang malaikat menjawab, "Jam-jam itu menunjukkan tingkat kejujuran Anda sewaktu berkuasa. Semakin jujur, maka berputarnya semakin lambat. Semakin korup, berputarnya semakin cepat. Sebagai contoh, mari kita lihat jam Filipina."

Ferdinand Marcos, mantan penguasa Filipina, langsung pucat wajahnya. "Jam Filipina berputar kencang. Berarti memang benar, Marcos banyak korupsi," kata sang malaikat.

"Tuh lihat yang warnanya kuning," seseorang berseru kencang, "Jam dari mana itu? Berputarnya lebih kencang dibandingkan jam dari Filipina."

"Oh, itu jam dari Kongo," sahut sang malaikat. "Tak heran kalau jam itu berputar tidak kalah cepat dari jam Filipina. Mobutu Seseko terkenal korup."

Kerumunan orang itu mulai mencari jam-jam dari semua negara. Mereka mencari-cari jam yang bersal dari Indonesia. Setelah lama mencari dan tak ketemu, salah seorang dari mereka memberanikan diri bertanya kepada sang malaikat.

"Oh, jam Indonesia.....," kata malaikat sambil tersenyum geli. "Kami taruh di dapur. Sangat cocok dijadikan kipas angin!"

(HPI: 15)

Wacana humor politik di atas mengusung tema korupsi. Dalam hal ini tindak korupsi dianalogikan sama seperti putaran jam dinding, semakin cepat putarannya, maka semakin tinggi tingkat korupsi seorang pemimpin negara. Pada wacana humor politik di atas jam dinding yang berputar paling cepat adalah jam dinding milik pemimpin Indonesia. Putaran jam dinding Indonesia sangat cepat, sehingga cocok dijadikan kipas angin. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia termasuk negara terkorup di dunia.

KESIMPULAN

Analisis data di atas memaparkan (1) pelanggaran prinsip kerja sama dalam wacana humor politik, (2) implikatur percakapan dalam wacana humor politik, dan (3) tema dalam wacana humor politik.

Berdasarkan hasil analisis itu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip kerja sama memiliki empat maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Sebagian besar tuturan yang terdapat pada wacana humor politik sering melanggar keempat maksim tersebut. Tujuan dari pelanggaran maksim-maksim itu adalah untuk menciptakan atau membangun kelucuan pada wacana humor politik, sehingga penikmat humor memberikan respon tertawa atau tersenyum simpul setelah membaca wacana itu.
2. Implikatur terdiri dari (1) implikatur konvensional dan (2) implikatur nonkonvensional atau sering disebut implikatur percakapan. Kedua implikatur tersebut sering muncul pada wacana humor politik. Kedua implikatur itu berfungsi untuk menciptakan kelucuan.
3. Setelah melakukan analisis terhadap wacana humor politik, ditemukan berbagai tema tentang permasalahan politik. Tema itu diangkat untuk menciptakan kelucuan sekaligus sebagai sarana kritik politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Rustono. 1998. "Implikatur Percakapan Sebagai Penunjang Pengungkapan Humor di dalam Wacana Humor Verbal Lisan Berbahasa Indonesia." Disertasi S-3. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Semarang.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yule, George. 2006. *Pragmatik*. Terj. Indah Fajar Wahyuni dan Rombe Mustajab. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.